

BPK Bakal Dibekali Wewenang Penyelidikan

KARANGANYAR -Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertambah, tidak hanya melakukan pemeriksaan laporan keuangan saja.

Lembaga ini bakal memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dalam sebuah kasus, syaratnya bila Rancangan Undang Undang (RUU) BPK bisa disahkan pada 2016.

Ke depannya, BPK ini bisa memberikan rekomendasi serta bekerja sama dengan penegak hukum dalam penyelidikan terhadap laporan-laporan keuangan yang berpotensi merugikan negara," kata anggota Komisi XI DPR, Muhammad Hatta kepada wartawan se usai menghadiri kegiatan sosialisasi bertema "Peran BPK dan DPR dalam Pengelolaan Keuangan Negara yang Menuju Kesejahteraan Rakyat" di Lorin Hotel Solo, Senin (16/3).

Hatta menyatakan, saat ini menjadi momentum tepat agar kewenangan hingga tahap penyelidikan yang lebih spesifik diberikan kepada BPK. Lewat kewenangan ini, BPK tidak akan terus tersandung, karena hanya mampu memberikan hasil laporan keuangan tanpa bisa berbuat apa-apa.

Tak Bisa Diintervensi

"Jangan sampai temuan BPK tidak bisa ditindaklanjuti, dari temuan tidak berhenti di tengah jalan. Jangan sampai ditinggalkan aparat penegak hukum. Padahal hasil temuannya sudah maksimal karena ada kerugian negara," terangnya.

Wakil rakyat dari PAN ini menuturkan, meski memiliki

kewenangan audit, pekerjaan lembaga pemerintah ini tetap terpantau oleh legislatif. Di sisi lain institusi ini tidak bisa diintervensi oleh kementerian (pemerintah), sehingga statusnya bisa bebas dari konflik kepentingan. "BPK ini tidak independen mutlak, ya arahnya seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia). Tapi bisa dikontrol DPR, seperti hasil investigasinya," imbuhnya.

Terkait sampai sejauh mana RUU BPK di Senayati, Wakil rakyat dari Jateng VI menuturkan, tahun ini prosesnya sudah masuk di program legislasi nasional (prolegnas). "Tinggal pemerintah apakah akan diusulkan," terangnya.

Ketua BPK Harry Azhar Aziz saat ditanya pendapatnya tentang usulan UU BPK di DPR menjawab diplomatis. "Saya tidak berhak ngomong lagi, itu (RUU) sudah di DPR dan pemerintah yang berhak ngomong," kata dia. (J5-90)